



Menteri Israel Larang Masjid Kumandangkan Azan

Medan, MIMBAR - Menteri Keamanan Nasional Israel dari kelompok Yahudi ekstremis, Itamar Ben Gvir, melarang seluruh masjid di Israel dan Tepi Barat mengumandangkan azan untuk salat lima waktu.

■ Bersambung ke Hal 11



Muslim Palestina menjalani ibadah salat di luar Kubah Batu (Dome of the Rock) di kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. (Foto AFP)

Tito Keberatan Polri di Bawah Kemendagri

Jakarta, MIMBAR - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku keberatan jika Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Saya berkeberatan," kata Tito di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12). Tito mengatakan posisi Polri sudah dipisahkan dan berada di bawah presiden merupakan amanat Reformasi 1998. "Karena dari dulu sudah dipisahkan, di bawah presiden. Itu kehendak reformasi," ujarnya. Sebelumnya PDIP mengusulkan agar Polri ditempatkan di bawah Kemendagri atau TNI.

■ Bersambung ke Hal 11



Pasca Longsor

Jalan Medan-Berastagi Kembali Dibuka

Medan, MIMBAR - Setelah beberapa hari ditutup akibat longsor, akses jalan Medan-Berastagi di Desa Sempahe, Kecamatan Sibolangit, Deli Serdang resmi dibuka kembali untuk umum pada Senin (2/12/2024) pukul 09.00 WIB. Keputusan pembukaan jalan ini dilakukan setelah rapat koordinasi intensif antara

Polda Sumut, Balai Besar Jalan Nasional, BPBD, Basarnas, dan instansi terkait lainnya. Meski sudah operasional, proses pembersihan sisa material longsor masih terus dilakukan guna memastikan keamanan dan kelancaran bagi pengguna jalan. Direktur Lalu Lintas Polda Sumut, Kombes Pol Muji Ediyanto didampingi Kabid

Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi, menegaskan bahwa keputusan pembukaan jalan dilakukan setelah melalui evaluasi menyeluruh. "Kami sepakat untuk membuka jalan mulai pukul 9 pagi setelah memastikan sejumlah aspek keselamatan. Namun,

■ Bersambung ke Hal 11



Kemlu RI Bebaskan WNI Terancam Hukuman Mati

Jeddah, MIMBAR - Seorang warga negara Indonesia (WNI) berinisial HMM yang telah divonis hukuman mati di Arab Saudi, berhasil dipulangkan oleh pemerintah Indonesia. Proses pemulangan WNI tersebut dibantu oleh Kementerian Luar Negeri RI dan Konsulat Jenderal RI di Jeddah. HMM dideportasi dari Arab Saudi pada Kamis (28/11) dan tiba di tempat asalnya di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, pada Sabtu (30/12) WIB.

■ Bersambung ke Hal 11



KPK Akui Kewalahan Cari Harun Masiku

Jakarta, MIMBAR - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan pihaknya sampai saat ini tidak mengetahui keberadaan tersangka suap Harun Masiku yang menjadi buronan sejak beberapa tahun terakhir. "Kendalanya apa yah, kita tidak tahu saja keberadaan (Harun Masiku), itu kendalanya. Masalahnya kita enggak tahu keberadaan yang bersangkutan," kata Alex di Sanur, Denpasar, Bali, Selasa (2/12).

■ Bersambung ke Hal 11

Jadwal Salat

1 JUMADIL AKHIR 1446 H

Subuh : 04:57 WIB	Maghrib : 18:15 WIB
Zuhur : 12:18 WIB	Isya : 19:29 WIB
Ashar : 15:40 WIB	■ Untuk kota Medan sekitarnya

Hidayah

Israel Larang Azan

Oleh Dr A Rasyid, MA (Dosen FIS UINSU)



MENERUT data terbaru terdapat 1,7 juta atau sekitar 18 % dari total populasi penduduk Israel adalah beragama Islam. Mereka tinggal di Galilea, Nazaret, Yerusalem Timur, dan wilayah lainnya yang memiliki populasi Arab. Sedangkan rumah ibadah masjid sekitar 400 - 500 masjid. Sayangnya pemerintahan Israel mulai melarang kumandang azan menggunakan pengeras suara. Polisi di sana diperintahkan menarik semua alat pengeras suara di semua masjid. Pelarangan azan menggunakan pengeras suara,

■ Bersambung ke Hal 11

Polemik Wacana Polri di Bawah TNI atau Kemendagri Harus Lewat DPR

WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan usulan agar Polri berada di bawah TNI atau Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) harus melalui kajian dan proses politik di DPR.

"Kalau pun ada perubahan, pasti akan ada proses politik dulu di DPR, dan tentu harus melalui kajian," kata Bima di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12).

Bima menegaskan Undang-undang yang masih berlaku saat ini mengatur kepolisian berada langsung di bawah Presiden. Ia juga mengatakan tiap rencana perubahan pasti dipertim-



bangkan. Sebab, perubahan pasti akan berdampak pada keuangan negara dan kepada koordinasi antarlembaga negara. "Jadi pasti harus dipertimbangkan masak-masak semuanya. Jadi perbincangan itu pasti akan dilakukan di DPR," kata Bima.

Sebelumnya pihak PDIP mengusulkan agar Polri ditempatkan di bawah Kemendagri. Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menjelaskan alasan saat ini banyak masalah di internal Polri. Utamanya, Polri cawe-cawe di bidang politik.

■ Bersambung ke Hal 11

Harus Lewat...

Dari Halaman 1

Padahal, kata Deddy, Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memisahkan TNI dan Polri pada tahun 2000 agar Polri sebagai lembaga sipil yang dipersiapkan, bisa mandiri dalam melayani masyarakat.

"Tapi yang kita alami selama ini institusi Polri tidak saja di bidang politik, tapi hal-hal yang terkait dengan institusinya sendiri dan pelayanan pengayoman terhadap masyarakat mengalami degradasi luar biasa," kata

Deddy di kantor DPP PDIP, Jakarta, Ahad (1/12).

Di sisi lain, Ketua Komisi III DPR, Habiburokhan mengklaim mayoritas fraksi atau tujuh dari delapan fraksi di Komisi III DPR telah sepakat menolak usulan agar Polri berada di bawah TNI atau Kemendagri.

"Mayoritas fraksi di Komisi III menyampaikan tujuh dari delapan fraksi menyatakan tidak sepakat dengan usulan tersebut," kata Habib yang merupakan anggota asal Gerindra di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (2/12). **(cnni/js)**

Hidayah**UMP Naik...**

Dari Halaman 1

terutama jika diterapkan secara luas, memiliki potensi besar untuk memicu kemarahan umat Islam baik di tingkat lokal maupun internasional. Azan bukan hanya panggilan ibadah, tetapi juga simbol identitas dan keberadaan komunitas Muslim di suatu wilayah. Oleh karena itu, pembatasan azan sering kali dipandang sebagai serangan terhadap kebebasan beragama dan ekspresi budaya umat Islam.

Azan adalah bagian integral dari praktik Islam. Pembatasan azan dapat dianggap sebagai bentuk penindasan terhadap hak asasi manusia, khususnya kebebasan beragama. Dalam konteks Israel, hubungan yang tegang antara komunitas Yahudi dan Arab-Muslim sering kali membuat kebijakan semacam ini dianggap diskriminatif. Hal ini dapat memperburuk hubungan antar komunitas.

Umat Islam di seluruh dunia sering merasa solidaritas dengan saudara Muslim mereka di wilayah yang dianggap terpinggirkan. Jika pembatasan azan diberitakan secara luas, hal ini dapat memicu reaksi global, termasuk protes di negara-negara mayoritas Muslim.

Pelarangan azan bisa dilihat sebagai upaya lebih besar untuk membatasi simbol dan praktik keagamaan komunitas Muslim, terutama jika terjadi di wilayah-wilayah seperti Yerusalem Timur yang sudah menjadi isu sensitif.

Secara lokal, protes dan demonstrasi bisa terjadi di wilayah mayoritas Muslim di Israel, termasuk Galilea, Nazaret, dan Negev. Secara nasional juga akan memicu ketegangan politik antara warga Muslim dan pemerintah Israel dapat meningkat, dengan risiko memicu kekerasan atau konflik komunitas.

Tentu saja secara global bagi negara-negara Muslim mungkin mengancam kebijakan ini melalui forum internasional seperti PBB atau OKI (Organisasi Kerja Sama Islam). Reaksi publik berupa boikot, protes di kedutaan, atau aksi solidaritas juga mungkin terjadi.

Pelarangan azan dapat memicu kemarahan umat Islam secara luas jika dianggap sebagai tindakan diskriminatif atau bagian dari upaya yang lebih besar untuk menekan identitas Islam. Oleh karena itu, kebijakan semacam ini memerlukan pendekatan yang hati-hati, inklusif, dan transparan untuk menghindari eskalasi ketegangan.

Dalam perspektif teori komunikasi, kasus pelarangan azan ini dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang, termasuk komunikasi antarbudaya, teori konflik, dan komunikasi politik.

Komunikasi Antarbudaya (Intercultural Communication) bahwa pelarangan azan dilihat sebagai kegagalan komunikasi antar budaya mayoritas Yahudi dan minoritas Muslim di Israel. Azan adalah sim-

bol identitas budaya dan agama yang penting bagi umat Islam, sementara sebagian masyarakat Yahudi mungkin melihatnya dari sudut pandang kebisingan, bukan nilai simboliknya.

Dalam Model Kluckhohn-Strodtbeck, konflik semacam ini dapat dipahami sebagai perbedaan nilai. Misalnya, umat Islam mungkin menilai pentingnya azan sebagai ekspresi kolektif religius, sementara masyarakat lain mungkin lebih menekankan kenyamanan individu (seperti menghindari suara keras di pagi hari).

Teori Konflik Konstruktif (Constructive Conflict). Jika dilihat sebagai peluang untuk dialog, pembatasan azan dapat menjadi awal untuk menemukan solusi bersama. Proses ini membutuhkan komunikasi yang menghormati perbedaan budaya dan keyakinan.

Menurut Teori Konflik Simbolik, azan bukan hanya soal suara, tetapi simbol dominasi, pengakuan, dan identitas komunitas. Pelarangan azan dapat memicu resistensi karena dianggap sebagai upaya untuk menekan simbol keagamaan komunitas Muslim.

Dalam teori Habermas atau teori ruang publik, ruang publik adalah tempat berbagai kepentingan dan pandangan dibahas secara terbuka. Pelarangan azan dapat dilihat sebagai dominasi oleh satu kelompok (mayoritas Yahudi) atas kelompok lain (minoritas Muslim), sehingga membatasi kebebasan berkomunikasi di ruang publik.

Kebijakan seperti ini seharusnya dibahas melalui proses deliberatif yang melibatkan semua pihak terkait, termasuk komunitas Muslim, untuk menciptakan solusi yang adil.

Teori Agenda Setting dalam Komunikasi Politik. Bagaimana media Israel dan internasional melaporkan isu ini memengaruhi persepsi publik. Jika pelarangan azan difokuskan pada aspek "kebisingan", itu dapat meremehkan pentingnya azan sebagai simbol religius.

Sebaliknya, jika media membingkai ini sebagai "penindasan agama", itu dapat memperburuk ketegangan. Retorika politisi yang mendukung atau menentang kebijakan ini akan membentuk opini masyarakat. Narasi yang bias dapat memperuncing konflik.

Teori Spiral Keheningan (Noelle-Neumann). Dalam komunitas campuran, Muslim mungkin merasa suara mereka tidak didengar atau takut untuk mengekspresikan keberatannya karena tekanan sosial atau politik. Ini menciptakan spiral keheningan, di mana pandangan mereka semakin tersisih.

Teori Dialogis (Bakhtin) menekankan pentingnya dialog terbuka yang melibatkan semua pihak. Dalam kasus ini, pelarangan azan dapat mencerminkan kurangnya dialog yang bermakna antara pemerintah, komunitas Yahudi, dan Muslim. Dialog yang sejati memerlukan penghormatan terhadap keberagaman simbol dan nilai.

PROGRAM BANTUAN PANGAN JANUARI-FEBRUARI 2025**Pemerintah Siapkan Rp6 T**

Jakarta, MIMBAR - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp6 triliun untuk bantuan pangan berupa beras 10 kg pada Januari - Februari 2025.

Anggaran tersebut akan diambil dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat (BA BUN).

"Totalnya (anggaran) untuk dua itu kurang lebih Rp6 triliun. Diantar dari dana BUN," kata pria yang

akrab disapa Zulhas itu di Kompleks Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/12).

Zulhas mengatakan pemberian bantuan pangan telah disetujui dalam rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Bantuan pangan akan diberikan kepada 16 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Sehingga total beras yang dibutuhkan sebanyak 160 ribu per bulan selama Januari hingga Februari 2025.

Tak hanya bantuan pangan,

pemerintah juga akan melakukan operasi pasar dengan menggelontorkan beras stabilisasi harga dan pasokan pangan (SPHP) milik Perum Bulog.

"Operasi pasar beras SPHP itu 150 ribu ton di Januari dan 150 ribu ton di Februari. Dengan begitu Bulog stoknya akan berkurang dan nanti pada Maret-April akan panen raya, Bulog harus membeli gabah karena panennya kan di atas 3 juta ton. Pada Maret-Mei, Bulog harus membeli kira-kira 2 juta ton gabah

petani," katanya.

Sementara itu, Zulhas meminta tambahan anggaran kepada DPR untuk kemeriaannya sebesar Rp510 miliar dari alokasi yang didapat Rp40 miliar pada 2025. Anggaran itu katanya dibutuhkan untuk mencapai target swasembada pangan pada 2027.

Dengan tambahan itu, anggaran Kementerian Koordinator Pangan pada 2025 akan mencapai Rp550 miliar.

"Mohon para pak ketua (DPR), jangan dipotong pak. Nasib kita di sini nih pak. Jangan dipotong kalau bisa, ditambah juga enggak usah. Kalau bisa pas saja," katanya.

Zulhas sebelumnya mengungkapkan target mewujudkan swasembada pangan dipercepat dari yang awalnya pada 2028 menjadi 2027. Menurutnya, hal itu disampaikan Prabowo dalam lawatannya di sejumlah forum internasional seperti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 dan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC).

"Kita kan perintah presiden swasembada (pada) 2028, sekarang sudah maju lagi. Kemarin Bapak Presiden sudah mengumumkan di G20, di APEC, bukan 2028, (jadi) 2027," ujar dia dalam konferensi pers di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Kamis (20/11). **(cnni/js)**

**Kemlu Ri...**

Dari Halaman 1

la sampai ke sana dengan pendampingan dari pihak Kemlu RI, Dinas Perindustrian dan Kettenagakerjaan Kabupaten Bangkalan, serta pendampingan dari Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Pamekasan.

HMM sendiri sudah ditahan dan divonis hukuman mati di Arab Saudi sejak 2009. Saat itu, ia menjadi tersangka pembunuhan suaminya yang juga berkewarganegaraan Arab Saudi.

Selama ini, Kemlu RI dan KJRI Jeddah sudah melakukan berbagai upaya diplomasi untuk memulangkan dan membebaskan HMM dari vonis hukuman mati.

Pada 2024 ini, KJRI Jeddah juga sudah

mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jeddah dan melakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung di Riyadh untuk meringankan hukuman HMM. KJRI Jeddah juga kerap melakukan pendampingan terhadap HMM selama melakukan enam kali proses penyelidikan dan 13 kali proses persidangan.

Selain itu, KJRI Jeddah juga sering mengunjungi HMM selama dirinya ditahan di Penjara Briman dan Penjara Dzahban di Jeddah.

Semua upaya tersebut berhasil membatalkan vonis mati HMM yang sudah ditetapkan Arab Saudi sejak 2009. HMM akhirnya dibebaskan dari penjara usai menjalani masa tahanan selama 15 tahun.

HMM juga telah memenuhi tuntutan diyat atau denda sebesar SAR400.000 atau setara

Menteri Israel...

Dari Halaman 1

Ben Gvir dalam akun X menyatakan bahwa kumandang azan dianggap terlalu mengganggu warga Israel sehingga harus dilarang.

Ia kemudian menyebutkan bahwa kebijakan itu diumumkan bersamaan dengan menteri ekstremis Israel lainnya, Idit Silman yang mengatakan bahwa azan di masjid adalah "suara bising yang tidak masuk akal", demikian dikutip dari Arab News.

Ben Gvir kemudian menyatakan bahwa pelanggaran terhadap aturan itu merupakan sebuah "pelanggaran hukum." Ia juga menegaskan rasa bangganya atas pelarangan azan

di masjid-masjid.

Menteri kelompok Yahudi garis keras itu bahkan menilai azan tersebut berbahaya bagi warga Israel yang tinggal di dekat masjid. Televisi Israel Channel 12 melaporkan bahwa Ben Gvir meminta kepolisian segera menjalankan perintahnya memasuki masjid-masjid, menyita pengeras suara dan menerapkan denda jika ada pelanggaran.

Pemimpin Partai Persatuan Arab, Mansour Abbas, mengatakan Ben Gvir sengaja "berupaya mengipasi api dan menarik warga Arab muslim terpancing dalam provokasinya."

"Dia (Ben Gvir) gagal di Masjid Al Aqsa

Tito Keberatan...

Dari Halaman 1

Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menjelaskan alasan usulannya itu karena banyak masalah di internal Polri. Utamanya, Polri cawe-cawe di bidang politik.

Padahal, Deddy mengatakan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati

Soekarnoputri memisahkan TNI dan Polri pada tahun 2000 agar Polri sebagai lembaga sipil yang dipersiapkan, bisa mandiri dalam melayani masyarakat.

"Tapi yang kita alami selama ini institusi Polri tidak saja di bidang politik, tapi hal-hal yang terkait dengan institusinya sendiri dan pelayanan pengayoman terhadap masyarakat

KPK Akui...

Dari Halaman 1

Alex mengklaim tim KPK terus mencari mantan calon anggota DPR dari PDIP itu. Menurutnya, tidak mudah untuk mencari orang di Indonesia yang memiliki wilayah luas.

"Kita tetap terus carik kok, 270 juta orang loh masyarakat Indonesia, kita enggak tahu keberadaannya satu per satu. Saya pikir Indonesia luas juga kan jangankan dia lari ke mana, itu di Jakarta kita juga susah nyarinya," ujarnya menambahkan.

Alex pun tak ambil pusing dengan sayem-

bara menangkap Harun Masiku bakal diberi hadiah Rp8 miliar oleh mantan kader PDIP yang kini gabung Gerindra Maruarar Sirait.

"Ini ada sayembara kan, yaudah kalian ikut saja kalau tau, siapa tau dapat Rp8 miliar," ujarnya.

"Kenapa, kan di dalam Undang-undang KPK kan sudah jelas di sana. Di dalam rangka pemberantasan korupsi, KPK itu mengajak seluruh elemen bangsa. Nah kalau ada masyarakat yang merasa mungkin kenapa sih enggak ketemu-ketemu bikinlah sayembara, gitu kan. Toh enggak pakai uang negara juga kan. Kalau bisa sih, saya mau bikin sayem-

Rp6,3 miliar yang seluruh pembayarannya ditanggung oleh seorang filantropis Arab Saudi.

Sepanjang 2024, Kemlu RI tercatat sudah mengupayakan pembebasan 26 WNI yang sebelumnya terancam hukuman mati. Namun, jumlah WNI terlibat kasus dengan ancaman hukuman mati bertambah sebanyak 20 orang.

Hingga saat ini, tercatat ada sebanyak 155 kasus hukuman mati yang sedang ditangani oleh pemerintah Indonesia yang mayoritasnya berada di Malaysia.

Kemlu RI mengimbau agar seluruh WNI di luar negeri untuk tetap mematuhi peraturan negara setempat di mana pun mereka berada dan menghindari tindak pidana maupun perdata, baik yang dilakukan secara disengaja maupun yang tidak disengaja. **(cnni/js)**

dan hari ini mencoba memprovokasi seluruh masjid. Ben Gvir secara konstan mencoba menyabotase kehidupan di negeri ini dan saatnya mengakhiri semua ini," kata Abbas dalam akun X.

Anggota Parlemen Israel Knesset, Gilad Kariv, turut mengemukakan keputusan Ben Gvir yang menilai kebijakan itu "membahayakan" Israel. Ia juga mengatakan Ben Gvir akan terus melakukan segala cara untuk mengobarkan api permusuhan.

"Si bajingan ini (Ben Gvir) tak akan berhenti hingga korek api berhasil menyalakan tong bahan bakar," tulis Kariv dalam akun X. **(cnni/js)**

mengalami degradasi luar biasa," kata Deddy di kantor DPP PDIP, Jakarta, Minggu (1/12).

Di sisi lain, Ketua Komisi III DPR, Habiburokhan mengklaim mayoritas fraksi atau tujuh dari delapan fraksi di Komisi III DPR telah sepakat menolak usulan agar Polri berada di bawah TNI atau Kemendagri. **(cnni/js)**

bara juga lembaga tapi negara kan gak ada yang seperti itu," kata Alex menambahkan. Sebelumnya, sayembara Rp 8 miliar itu diungkap Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di sebuah video yang beredar di media sosial. Dalam cuplikan itu Maruarar mengatakan bonus uang bagi yang bisa menangkap Harun Masiku itu berasal dari kantong pribadinya.

"Saya akan kasih bonus bagi yang bisa menangkap Harun Masiku Rp8 miliar uang pribadi saya, ya supaya semangat, supaya tidak ada lagi yang kebal hukum," kata Maruarar di video itu. **(cnni/js)**

lintas dan mempermudah perjalanan, Kombes Muji merekomendasikan penggunaan jalur alternatif.

"Bagi kendaraan kecil atau pribadi, jalur alternatif melalui Sembaha atau Tuntungan dapat digunakan. Sedangkan untuk kendaraan besar atau berat, kami sarankan menggunakan rute Pematang Siantar. Ini dilakukan untuk menjaga kelancaran di jalur utama," jelasnya.

Koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan untuk memastikan lalu lintas tetap aman dan terkendali. Dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kewaspadaan, Polda Sumut bersama seluruh pihak berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat serta menjaga kelancaran lalu lintas di jalur strategis ini. **(A-10)**

Jalan Medan-Berastagi...

Dari Halaman 1

untuk mencegah gangguan lebih lanjut," kata Kombes Muji.

Ia juga menekankan bahwa pembukaan jalan bersifat situasional, dengan kemungkinan penutupan sementara jika cuaca buruk terjadi, untuk melindungi keselamatan para pengguna jalan.

Evakuasi kendaraan yang sebelumnya tertimbun material longsor juga hampir selesai. Sebagian besar kendaraan telah berhasil dievakuasi, sementara satu unit mobil yang masih tertinggal direncanakan akan ditarik menggunakan crane hari ini. Upaya evakuasi ini diharapkan dapat menyelesaikan semua kendala di lokasi longsor, sehingga akses jalan dapat sepenuhnya pulih tanpa hambatan.

Untuk meminimalkan risiko kepadatan lalu